

PERAN GERAKAN SOSIAL #ENDSARS DALAM PEMBUBARAN SARS DI NIGERIA TAHUN 2017-2020

Dwi Angelian Agustina¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini membahas peran gerakan sosial #EndSARS dalam mendorong pembubaran *Special Anti-Robbery Squad* (SARS) di Nigeria pada periode 2017–2020. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil, khususnya kaum muda. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana aktivisme digital dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi, advokasi, dan tekanan politik terhadap negara untuk mendorong reformasi institusional. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menggunakan sumber sekunder seperti laporan organisasi HAM internasional, artikel jurnal, dan media daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivisme digital berperan penting dalam membangun kesadaran publik, mengorganisasi aksi, serta menciptakan solidaritas lintas kelas dan negara. Melalui media sosial, tagar #EndSARS berhasil mengangkat isu lokal menjadi agenda global dan menekan pemerintah Nigeria untuk membubarkan SARS pada Oktober 2020.

Kata Kunci: #EndSARS, Gerakan Sosial Baru, Aktivisme Digital, Hak Asasi Manusia, Nigeria

Abstract

This study examines the role of the #EndSARS social movement in advocating for the disbandment of the Special Anti-Robbery Squad (SARS) in Nigeria from 2017 to 2020. The movement arose in response to widespread human rights abuses committed by the Nigerian police, particularly against young people. The study aims to analyze how digital activism functioned as a tool for mobilization, advocacy, and political pressure to achieve institutional reform. Using a qualitative descriptive method with a library research approach, the study draws on secondary sources such as reports from human rights organizations, scholarly articles, and online media. The findings reveal that digital activism played a vital role in raising awareness, organizing protests, and fostering solidarity across social and national boundaries. Through social media, the #EndSARS hashtag turned a local issue into a global movement, compelling the Nigerian government to dissolve SARS in October 2020.

Keywords: #EndSARS, New Social Movements, Digital Activism, Human Rights, Nigeria

1. PENDAHULUAN

Nigeria mengalami lonjakan kriminalitas bersenjata sejak awal 1990-an, yang mendorong pemerintah membentuk *Special Anti-Robbery Squad* (SARS) pada tahun 1992 sebagai bagian dari *Nigerian Police Force* (NPF) (Alemika & Chukwuma,

2000). Awalnya, SARS efektif mengurangi tindak kejahatan berat seperti perampokan dan penculikan. Namun, seiring waktu, unit ini berubah menjadi simbol kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (Human Rights Watch, 2005). *Amnesty International* (2020) mencatat bahwa sepanjang 2017–2020 terjadi setidaknya 82 kasus penyiksaan, penahanan ilegal, dan pembunuhan di luar hukum oleh anggota SARS. Kelompok yang paling sering menjadi korban adalah pemuda, terutama mereka yang berpenampilan modern atau memiliki barang-barang teknologi seperti ponsel dan laptop, yang secara stereotip diasosiasikan sebagai pelaku “cybercrime”.

Rezim hukum yang lemah dan budaya impunitas memperparah situasi tersebut. Upaya reformasi yang dijanjikan pemerintah sejak 2015 tidak pernah terealisasi secara konkret, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat keamanan. Dalam konteks inilah, muncul gerakan digital yang dikenal dengan tagar #EndSARS, dipelopori oleh pengacara Segun Awosanya (dikenal sebagai @segalink di Twitter) pada tahun 2017. Melalui dokumentasi kasus, narasi korban, dan seruan perubahan, gerakan ini segera mendapat resonansi nasional dan internasional (Makinde, 2020).

Tagar #EndSARS menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan polisi dan ketidakadilan struktural. Dalam waktu singkat, jutaan warga muda bergabung dalam percakapan daring, mengubah keluhan pribadi menjadi aksi kolektif (Makinde, 2020). Protes daring ini kemudian meluas menjadi demonstrasi luring di berbagai kota besar pada Oktober 2020, menandai babak baru dalam sejarah gerakan sosial Nigeria. Penelitian ini penting karena menunjukkan bagaimana aktivisme digital mengubah dinamika mobilisasi sosial di abad ke-21. Dengan menganalisis #EndSARS melalui lensa Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) dan aktivisme digital, penelitian ini berupaya memahami pergeseran kekuatan masyarakat sipil di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran gerakan sosial #EndSARS dalam mendorong pembubaran SARS melalui kekuatan mobilisasi digital dan advokasi publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari sumber sekunder seperti jurnal

ilmiah, laporan lembaga HAM internasional, buku akademik, dan artikel berita daring yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi, interpretasi, dan sintesis data sesuai dengan fokus penelitian, yakni peran gerakan #EndSARS dalam pembubaran SARS.

LANDASAN KONSEP

1. Konsep Gerakan Sosial Baru

Gerakan Sosial Baru (GSB) muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori gerakan sosial klasik yang terlalu menekankan pada isu ekonomi dan konflik kelas (Pichardo, 1997). Jika gerakan sosial klasik berfokus pada perjuangan buruh atau redistribusi ekonomi, maka GSB menekankan nilai-nilai identitas, kebebasan, lingkungan, dan hak asasi manusia sebagai inti perjuangannya (Suharko, 2006; Singh, 2001).

Pichardo (1997) menjelaskan bahwa GSB berkembang di masyarakat pasca-industri yang menuntut perubahan nilai dan gaya hidup daripada perubahan kebijakan ekonomi semata. Gerakan ini berorientasi pada perjuangan simbolik dan kultural, bukan hanya politik atau ekonomi. Dalam konteks ini, masyarakat sipil menjadi arena utama dalam memperjuangkan otonomi, pluralitas, dan keadilan sosial (Cohen dalam Singh, 2001). GSB memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Ideologi dan Tujuan. GSB meninggalkan ideologi materialistik dan berfokus pada perjuangan lintas kelas untuk keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pengakuan identitas (Pichardo, 1997).

2. Struktur dan Organisasi. Gerakan ini bersifat non-hierarkis, desentralistik, dan horizontal, mengandalkan koordinasi berbasis jaringan digital serta partisipasi sukarela (Offe, 1985; Uwalaka & Nwala, 2021).

3. Taktik dan Strategi. GSB menggunakan strategi mobilisasi non-konvensional seperti demonstrasi damai, simbolisme, dan kampanye media sosial (Singh, 2001; Bennett & Segerberg, 2012).

4. Aktor Partisipan. Peserta GSB berasal dari berbagai latar sosial, khususnya kelas menengah baru yang bekerja di sektor kreatif, pendidikan, dan teknologi (Pichardo, 1997; Ezeibe et al., 2023).

Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan pendekatan yang menjelaskan munculnya bentuk-bentuk perjuangan sosial yang tidak lagi berfokus pada isu ekonomi atau kelas, melainkan pada nilai-nilai identitas, kebebasan, dan hak asasi manusia. Menurut Pichardo (1997), gerakan sosial baru berorientasi pada pembentukan kesadaran kolektif, solidaritas, serta perubahan nilai dalam masyarakat. Gerakan ini bersifat non-hierarkis, terdesentralisasi, dan menggunakan jaringan komunikasi modern untuk menyebarkan gagasan serta memobilisasi dukungan.

2. Konsep Aktivisme Digital

Mary Joyce (2010) mendefinisikan aktivisme digital sebagai penggunaan teknologi digital terutama media sosial untuk mencapai tujuan sosial atau politik. Aktivisme digital memungkinkan individu dan kelompok masyarakat melakukan advokasi, menyebarkan informasi, dan mengorganisasi aksi secara cepat tanpa memerlukan struktur organisasi tradisional.

Joyce membagi peran aktivisme digital ke dalam tiga fungsi utama: (1) diseminasi informasi, yaitu penyebaran isu sosial secara luas untuk membangun kesadaran publik; (2) mobilisasi massa, yaitu menggerakkan partisipasi warga melalui *platform* daring; dan (3) pengawasan kekuasaan, yakni penggunaan teknologi digital untuk menekan pemerintah agar bertanggung jawab terhadap kebijakan dan tindakan represifnya.

3. PERAN GERAKAN SOSIAL #ENDSARS DALAM PEMBUBARAN SARS DI NIGERIA TAHUN 2017-2020

Konteks Sosial Politik Pembentukan dan Operasi SARS di Nigeria

Krisis sosial, ekonomi, dan politik yang melanda Nigeria pada awal 1990-an menjadi faktor utama terbentuknya unit kepolisian khusus bernama *Special Anti-Robbery Squad* (SARS). Unit ini dibentuk oleh *Nigeria Police Force* (NPF) pada

tahun 1992 di bawah *Criminal Investigation and Intelligence Department* (CIID) untuk merespons meningkatnya angka kejahatan bersenjata di berbagai wilayah perkotaan seperti Lagos, Port Harcourt, dan Abuja (Alemika & Chukwuma, 2000). Tujuan awal pembentukan SARS adalah memberikan reaksi cepat terhadap kasus penculikan, perampokan bersenjata, dan kejahatan terorganisir yang saat itu mengancam stabilitas nasional.

Namun, dalam praktiknya, SARS berubah menjadi instrumen represif negara yang kerap melanggar hak asasi manusia. *Amnesty International* (2020) melaporkan bahwa antara Januari 2017 hingga Mei 2020, setidaknya terdapat 82 kasus penyiksaan, pemerasan, dan pembunuhan di luar proses hukum oleh anggota SARS. Korban sebagian besar adalah generasi muda Nigeria yang ditangkap tanpa surat resmi hanya karena berpenampilan modis, memiliki telepon pintar, atau mengendarai kendaraan pribadi yang dianggap “mencurigakan”.

Praktik brutal ini berlangsung dalam ruang impunitas yang luas karena lemahnya pengawasan institusional dan minimnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan di tubuh kepolisian (Oluwaniyi, 2010). Negara gagal menghadirkan mekanisme pertanggungjawaban internal yang transparan, sehingga membentuk persepsi publik bahwa kepolisian adalah simbol ketidakadilan, bukan pelindung masyarakat. Dari sinilah lahir bibit resistensi yang kemudian memuncak dalam bentuk gerakan sosial digital #EndSARS pada tahun 2017.

Lahirnya Gerakan Sosial #EndSARS dan Karakteristiknya sebagai Gerakan Sosial Baru

Gerakan #EndSARS muncul pada Oktober 2017 melalui kampanye digital yang dipelopori oleh pengacara Nigeria bernama Segun Awosanya (@segalink) di platform Twitter. Awosanya menggunakan tagar #EndSARS untuk mendokumentasikan kekerasan aparat dan menggalang dukungan publik guna menuntut pembubaran unit tersebut (Makinde, 2020). Dalam waktu singkat, tagar ini menjadi pusat perlawanan digital terhadap kekerasan institusional.

Meskipun seruan untuk mengakhiri SARS sudah ada sejak 2017, mobilisasi besar-besaran dan yang paling masif terjadi pada Oktober 2020. Pemicunya adalah

beredarnya sebuah video viral yang menunjukkan dugaan pembunuhan seorang pemuda oleh petugas SARS di negara bagian Delta. Video ini memicu gelombang kemarahan publik yang mendalam. Protes dimulai di jalanan dan dengan cepat didukung oleh kampanye digital besar-besaran dengan tagar #EndSARS, meluas dari kota-kota besar Nigeria seperti Lagos, Abuja, dan Port Harcourt, hingga ke diaspora Nigeria di seluruh dunia. Gerakan ini bukan hanya menuntut pembubaran SARS, tetapi juga reformasi kepolisian yang lebih luas dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

Ledakan protes terjadi pada 8 Oktober 2020, ketika ribuan warga muda Nigeria turun ke jalan di Lagos, Abuja, dan kota besar lainnya dengan membawa poster bertuliskan “*End Police Brutality*”. Media sosial berperan sentral dalam mengoordinasikan aksi tersebut. Dalam kurun waktu satu minggu, lebih dari 28 juta unggahan menggunakan tagar #EndSARS muncul di Twitter (Raji, 2021). Mobilisasi digital ini menjadi fondasi munculnya solidaritas kolektif lintas kota dan lintas negara, termasuk di kalangan diaspora Nigeria (Uwalaka & Nwala, 2021).

Gerakan ini mencerminkan karakteristik Gerakan Sosial Baru (GSB) sebagaimana dijelaskan oleh Nelson A. Pichardo (1997), yang menekankan perjuangan non-material seperti hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan sosial, bukan sekadar tuntutan ekonomi atau politik struktural. Aktor-aktor gerakan ini berasal dari berbagai lapisan sosial, terutama kelas menengah terdidik dan generasi muda urban yang aktif di ruang digital. Mereka tidak bergerak dalam struktur hierarkis, tetapi menggunakan pola koordinasi horizontal berbasis jaringan (*network-based activism*).

Ideologi dan Tujuan Gerakan Sosial #EndSARS, Tujuan utama #EndSARS adalah meraih keamanan hidup, martabat manusia, dan keadilan sistemik, bukan sekadar kenaikan gaji atau reformasi ekonomi. Tuntutan ini bersifat post-material, berkaitan dengan kualitas hidup dan nilai-nilai moral. Secara eksplisit, gerakan #EndSARS menyusun paket tuntutan lima poin utama (#5for5) yang dirilis pada 11 Oktober 2020, yaitu: 1) Pembebasan semua pengunjuk rasa yang ditahan secara sewenang-wenang; 2) Keadilan bagi korban kekerasan polisi dan kompensasi bagi keluarga korban; 3) Pembentukan badan pengawas independen untuk menginvestigasi kasus pelanggaran aparat; 4) Evaluasi psikologis dan pelatihan

ulang bagi anggota SARS sebelum dipindahkan ke unit lain dan 5) Peningkatan gaji dan kesejahteraan polisi agar mengurangi praktik korupsi (Raji, 2021; Cowell, 2020).

Tuntutan ini memperlihatkan bahwa ideologi gerakan bukan anarkis, melainkan reformis dan konstruktif. #EndSARS menolak kekerasan sebagai taktik, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam sistem keamanan Nigeria (Makinde, 2020). Nilai-nilai tersebut juga memperlihatkan ciri khas gerakan sosial baru yang menolak ideologi politik tradisional (kiri-kanan), dan menggantinya dengan politik nilai berbasis kemanusiaan universal (Pichardo, 1997).

Struktur dan Taktik Gerakan #EndSARS

Salah satu ciri paling menonjol dari gerakan #EndSARS adalah struktur organisasi yang non-hierarkis dan terdesentralisasi. Gerakan ini tidak memiliki pemimpin tunggal; koordinasi aksi dilakukan melalui jaringan media sosial yang bersifat horizontal (Agustina, 2025). Menurut konsep Pichardo (1997), struktur semacam ini mencerminkan pola baru dalam gerakan sosial modern, di mana kekuatan kolektif menggantikan figur kepemimpinan.

Berbeda dengan gerakan politik tradisional, #EndSARS dikelola secara organik oleh kelompok-kelompok kecil dan individu independen yang berperan sesuai kapasitasnya. Misalnya: *Feminist Coalition*, kelompok perempuan muda profesional, bertugas mengelola donasi publik secara transparan untuk mendukung aksi protes dan bantuan hukum bagi korban penangkapan. Tim hukum pro bono menyediakan pendampingan bagi demonstran yang ditahan oleh polisi. Tim medis sukarelawan mendirikan pos kesehatan lapangan selama aksi berlangsung. Tim media dan dokumentasi bertanggung jawab menyebarkan informasi, bukti kekerasan, dan klarifikasi isu hoaks di media sosial (BBC, 2020).

Taktik yang digunakan #EndSARS meliputi: **Pertama**, Aktivisme digital, penggunaan tagar #EndSARS di Twitter, Facebook, dan Instagram untuk menyebarkan bukti kekerasan serta menggalang opini publik (Joyce, 2010). **Kedua**, kampanye damai di ruang publik, aksi demonstrasi tanpa kekerasan di berbagai kota besar dengan membawa simbol-simbol nasional seperti bendera Nigeria dan lagu kebangsaan. **Ketiga**, *Crowdfunding* dan transparansi keuangan, donasi publik

dikelola secara daring dengan laporan harian, meningkatkan legitimasi moral gerakan. Ke-empat, Narasi visual berupa video, foto, dan poster kreatif digunakan untuk memperkuat pesan moral dan menarik simpati global (Raji, 2021).

Partisipan Gerakan Sosial #EndSARS terdiri dari berbagai lintas yang terdiri dari:

1. Generasi muda urban (kelas menengah bawah dan atas) kelompok terbesar dalam aksi, terdiri atas mahasiswa, profesional muda, pekerja kreatif, dan penganggur terdidik. Mereka adalah pihak yang paling sering mengalami kekerasan dari SARS.
2. Aktivis digital meliputi penggiat media sosial, jurnalis warga, dan influencer yang berperan menyebarkan narasi dan membentuk opini publik.
3. Koalisi feminis (*Feminist Coalition*), perempuan muda profesional yang menjadi penggerak utama dalam koordinasi logistik dan dana, sekaligus memperluas agenda gerakan ke isu kesetaraan gender dan representasi perempuan.
4. Selebritas dan tokoh publik seperti Burna Boy, Wizkid, Davido, Falz, dan Genevieve Nnaji, yang memanfaatkan pengaruh mereka di media global untuk menarik perhatian internasional terhadap gerakan (Uwalaka & Nwala, 2021).
5. Diaspora Nigeria yaitu warga Nigeria di luar negeri (Amerika Serikat, Inggris, Kanada) yang menyelenggarakan aksi solidaritas di depan kantor diplomatik Nigeria, memperluas cakupan gerakan ke tingkat global (Iwilade, 2020).
6. Organisasi masyarakat sipil dan pengacara yang membantu menyediakan layanan hukum dan advokasi kebijakan setelah gelombang protes menurun.

Dinamika Gerakan #EndSARS Dan Peran Aktvisme Digital Dalam Membubarkan SARS Tahun 2020

Dinamika Gerakan #EndSARS dan Respons Pemerintah Nigeria

Gerakan #EndSARS memiliki dinamika yang unik karena berakar dari kombinasi antara aktivisme digital dan mobilisasi jalanan. Pada awalnya, tagar #EndSARS yang muncul di Twitter pada tahun 2017 berfungsi sebagai wadah keluhan masyarakat terhadap kekerasan aparat. Namun, intensitas gerakan

meningkat drastis pada Oktober 2020, setelah beredar video viral yang menunjukkan pembunuhan seorang warga sipil oleh anggota SARS di Ughelli, negara bagian Delta. Peristiwa tersebut menjadi pemicu gelombang protes nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya di Nigeria pasca reformasi 1999 (Raji, 2021).

Demonstrasi yang dimulai di Lagos dan Abuja kemudian menyebar ke lebih dari 20 negara bagian dalam hitungan hari. Uniknya, gerakan ini tidak memiliki pemimpin tunggal atau organisasi formal suatu karakteristik yang lazim dalam *new social movements* (Pichardo, 1997). Peserta protes datang dari berbagai latar belakang sosial: mahasiswa, profesional muda, seniman, pekerja kreatif, bahkan pebisnis teknologi. Ketidadaan hierarki membuat gerakan ini lebih sulit dipecah oleh otoritas negara, sekaligus memperlihatkan kekuatan solidaritas horizontal yang tumbuh dari media sosial.

Aksi-aksi protes dilakukan secara damai, dengan peserta membawa poster bertuliskan “*Stop Police Brutality*”, “*We are not criminals*”, dan “*Soro Soke*” (bahasa Yoruba yang berarti “berbicara lantang”). Mereka memanfaatkan musik, seni mural, dan doa bersama sebagai bentuk ekspresi non-kekerasan. Di Lagos, massa bahkan membersihkan sampah di lokasi demonstrasi dan membentuk dapur umum, menandakan kedewasaan politik generasi muda Nigeria (Uwalaka & Nwala, 2021).

Namun, di tengah semangat damai tersebut, pemerintah Nigeria merespons dengan tindakan represif. Pada 20 Oktober 2020, pasukan keamanan menembaki demonstran yang berkumpul di Gerbang Tol Lekki, Lagos. Insiden ini, yang kemudian dikenal sebagai *Lekki Toll Gate Massacre*, menewaskan setidaknya 12 orang menurut *Amnesty International* (2020), meski pemerintah sempat menyangkalnya. Video siaran langsung di Instagram oleh DJ Switch, seorang aktivis dan artis, memperlihatkan detik-detik penembakan dan menjadi bukti penting kekerasan negara di hadapan dunia internasional (BBC, 2020).

Setelah insiden tersebut, tekanan internasional meningkat. Dewan HAM PBB, Amnesty International, serta berbagai organisasi global mendesak pemerintah Nigeria untuk melakukan penyelidikan independen. Tekanan juga datang dari diaspora Nigeria yang melakukan aksi solidaritas di luar negeri. Di tengah tekanan itu, Presiden Muhammadu Buhari pada 11 Oktober 2020 mengumumkan pembubaran resmi SARS. Namun, publik merespons dengan skeptis karena unit

serupa telah dibubarkan dan dibentuk kembali dengan nama berbeda sebanyak lima kali sebelumnya (2017–2020). Hal ini menunjukkan bahwa pembubaran bersifat simbolik tanpa reformasi institusional yang nyata (Cowell, 2020).

Meskipun demikian, momentum pembubaran SARS tetap menjadi capaian penting dalam sejarah politik Nigeria modern. Ia menunjukkan bahwa masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk memaksa negara merespons tuntutan mereka, bahkan dalam konteks pemerintahan yang semi-otoritarian. Seperti yang disimpulkan oleh Aborisade (2021), #EndSARS merupakan “bukti transformasi politik generasi digital Nigeria yang menolak diam di hadapan ketidakadilan.”

Aktivisme Digital sebagai Alat Mobilisasi Sosial

Konsep aktivisme digital merupakan aspek penting dalam memahami efektivitas gerakan #EndSARS. Mary Joyce (2010) mendefinisikan aktivisme digital sebagai penggunaan teknologi digital termasuk internet, media sosial, dan perangkat seluler untuk mendorong perubahan sosial dan politik secara kolektif. Aktivisme digital menandai era baru perjuangan sosial yang bersifat inklusif, cepat, dan lintas batas.

Dalam konteks Nigeria, aktivisme digital menjadi ruang alternatif bagi masyarakat sipil yang selama ini dibungkam oleh struktur otoritarian. Melalui Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, aktivis dapat menyuarakan ketidakadilan dan mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan oleh aparat SARS. Setiap unggahan menjadi bentuk *counter-narrative* terhadap wacana resmi pemerintah yang sering menutupi pelanggaran HAM. Salah satu momen kunci terjadi pada 8 Oktober 2020, ketika video yang memperlihatkan pembunuhan seorang pemuda di negara bagian Delta oleh anggota SARS viral di media sosial. Dalam hitungan jam, tagar #EndSARS menjadi trending topik global, dengan lebih dari 28 juta unggahan (Twitter Data, 2020). Momentum ini mengubah protes lokal menjadi gerakan nasional. Media sosial berfungsi sebagai “mesin mobilisasi” yang mempercepat penyebaran pesan dan koordinasi aksi di berbagai kota besar seperti Lagos, Abuja, dan Port Harcourt.

Selain sebagai alat komunikasi, media sosial juga digunakan untuk koordinasi logistik dan penggalangan dana. Kelompok *Feminist Coalition* yang merupakan

sebuah jaringan aktivis perempuan muda Nigeria berhasil mengumpulkan ribuan dolar melalui sumbangan daring (*crowdfunding*) untuk mendukung demonstrasi, menyediakan makanan, obat-obatan, dan bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap. Transparansi mereka, termasuk laporan keuangan terbuka di Twitter, meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat solidaritas gerakan. Lebih jauh, aktivisme digital dalam #EndSARS juga memperlihatkan hubungan antara ruang lokal dan global.

Dukungan dari diaspora Nigeria di Amerika, Inggris, dan Kanada menunjukkan bagaimana teknologi digital memungkinkan pembentukan *transnational advocacy network* (Keck & Sikkink, 1998). Demonstrasi solidaritas digelar di London, New York, dan Toronto, menekan pemerintah asing untuk mengancam kekerasan di Nigeria. Dukungan internasional ini memperkuat tekanan terhadap pemerintah Presiden Muhammadu Buhari untuk melakukan tindakan konkret.

Namun, penggunaan aktivisme digital juga menghadapi tantangan. Pemerintah Nigeria menuduh gerakan #EndSARS disusupi oleh kekuatan asing dan melakukan upaya pembatasan informasi, termasuk pemblokiran internet di beberapa wilayah dan penutupan rekening bank aktivis. Hal ini menunjukkan paradoks digitalisasi: di satu sisi membuka ruang demokrasi, di sisi lain memunculkan bentuk baru represi digital (*digital authoritarianism*). Dengan demikian, aktivisme digital dalam gerakan #EndSARS bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga arena perjuangan politik. Ia memperlihatkan bagaimana ruang maya menjadi tempat kontestasi antara negara dan masyarakat sipil, serta memperluas makna partisipasi politik di abad ke-21.

Para demonstran memanfaatkan media sosial untuk mengatur logistik, membagikan lokasi aman, menyediakan bantuan medis, dan menggalang dana melalui *crowdfunding*. Transparansi pengelolaan dana melalui blockchain bahkan memperkuat kepercayaan publik terhadap gerakan, berbeda dari struktur birokratis pemerintah yang dianggap korup. Dalam konteks #EndSARS, media sosial menjadi infrastruktur utama dalam mengorganisasi perlawanan masyarakat sipil. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram digunakan untuk:

- a. Menyebarkan dokumentasi kekerasan: video dan foto korban menjadi bukti visual yang menggugah empati publik dan menantang narasi pemerintah.

- b. Mengorganisasi aksi protes: koordinasi aksi damai dilakukan melalui grup WhatsApp, siaran langsung (*live streaming*), dan *thread* di Twitter.
- c. Membangun solidaritas daring: aktivis dan selebritas menyuarakan tagar #EndSARS secara global, sehingga menciptakan jaringan dukungan internasional.
- d. Membangun narasi alternatif terhadap propaganda negara yang berupaya menstigmatisasi demonstran sebagai perusuh.

Gerakan sosial #EndSARS yang berkembang di Nigeria pada periode 2017–2020 memanfaatkan aktivisme digital sebagai instrumen utama untuk mendokumentasikan dan menyebarkan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh *Special Anti-Robbery Squad* (SARS). Aktivisme digital dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai alat bukti yang dapat memperkuat tuntutan reformasi kepolisian dan mendorong pembubaran SARS.

Solidaritas Global dan Tekanan Transnasional

Salah satu faktor yang membedakan #EndSARS dari gerakan sosial konvensional di Afrika adalah sifatnya yang transnasional. Gerakan ini melampaui batas negara melalui jaringan diaspora dan solidaritas digital global. Diaspora Nigeria di London, Toronto, dan Washington D.C. mengorganisasi aksi solidaritas serentak pada Oktober 2020, dengan membawa spanduk bertuliskan “*End Police Brutality in Nigeria*”. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menghubungkan narasi lokal dengan isu global tentang kekerasan negara dan hak asasi manusia.

Platform digital berperan sebagai “infrastruktur moral” (Castells, 2012) yang memperluas ruang solidaritas. Dukungan internasional datang dari selebritas dunia seperti Beyoncé, Rihanna, Drake, dan penyanyi Nigeria-Amerika Burna Boy. Mereka menggunakan pengaruh publik untuk menggalang kesadaran global. Jack Dorsey, CEO Twitter, bahkan mencuit dukungan resmi dan membantu promosi *Bitcoin donations* untuk mendukung para demonstran setelah rekening bank aktivis dibekukan oleh pemerintah Nigeria. Sementara itu diaspora Nigeria di Amerika Serikat dan Inggris mengadakan aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Nigeria. Fenomena ini menunjukkan bahwa #EndSARS telah bertransformasi dari gerakan nasional menjadi simbol perjuangan global melawan kekerasan negara (Uwalaka &

Nwala, 2021). Dengan dukungan luas ini, gerakan #EndSARS menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan generasi muda Afrika dalam memperjuangkan keadilan sosial di era digital.

Selain dukungan dari figur publik, organisasi internasional seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan *The United Nations Office on Human Rights* turut memberikan pernyataan resmi yang mengecam kekerasan aparat. Solidaritas global juga diperkuat oleh kesamaan pengalaman dengan gerakan sosial lain seperti *Black Lives Matter* (BLM) di Amerika Serikat. Kedua gerakan ini memiliki kesamaan dalam menolak kekerasan rasial dan institusional oleh aparat kepolisian. *Hashtag* #EndSARS bahkan sempat disandingkan dengan #BlackLivesMatter di berbagai platform digital. Dalam banyak hal, BLM menjadi inspirasi bagi struktur dan gaya komunikasi #EndSARS, terutama dalam penggunaan simbol visual seperti tangan terkepal dan poster digital. Perpaduan antara simbol, narasi, dan teknologi menjadikan #EndSARS bukan hanya protes lokal, tetapi juga bagian dari gerakan global melawan kekerasan negara.

TINJAUAN TUNTUTAN #5FOR5 PASCA PROTES #ENDSARS

Pasca berakhirnya gelombang besar protes #EndSARS pada Oktober 2020, lima tuntutan utama gerakan yang dikenal sebagai #5for5 tetap menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana pemerintah Nigeria menindaklanjuti aspirasi masyarakat sipil. Secara garis besar, kelima tuntutan tersebut mencakup: pembebasan seluruh tahanan protes, pemberian keadilan dan kompensasi bagi korban kekerasan polisi, pembentukan penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM, reformasi kepolisian yang komprehensif, serta peningkatan kesejahteraan aparat kepolisian.

Pasca-protes, pemerintah memang mengambil beberapa langkah formal untuk merespons tuntutan tersebut. Unit *Special Anti-Robbery Squad* (SARS) secara resmi dibubarkan, dan berbagai negara bagian membentuk *Judicial Panels of Inquiry* guna menyelidiki kasus kekerasan aparat. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan kemajuan yang terbatas. Banyak rekomendasi panel tidak diimplementasikan, dan hanya sebagian kecil korban yang menerima kompensasi. Kondisi ini menimbulkan

persepsi publik bahwa respons pemerintah lebih bersifat simbolik ketimbang substantif (Human Rights Watch, 2021).

Selain itu, tuntutan keempat dan kelima yakni reformasi kelembagaan dan kesejahteraan polisi masih jauh dari realisasi. Struktur kepolisian Nigeria tetap menghadapi persoalan mendasar seperti korupsi, kurangnya akuntabilitas, dan kekerasan sistemik. Reformasi yang dijanjikan, seperti pelatihan HAM atau sistem pengawasan eksternal, belum dijalankan secara menyeluruh. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara komitmen politik dan implementasi kebijakan yang nyata.

Meski demikian, warisan sosial dari #5for5 tetap signifikan. Lima tuntutan tersebut menjadi agenda moral yang terus dihidupkan oleh organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, dan komunitas diaspora Nigeria. Dalam ranah publik, #5for5 telah mengubah orientasi masyarakat terhadap peran kepolisian dan menumbuhkan kesadaran baru tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas negara. Tuntutan tersebut kini berfungsi sebagai *normative framework* bagi reformasi sektor keamanan di Nigeria. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar tuntutan #5for5 belum terealisasi secara struktural, gerakan ini berhasil menanamkan fondasi perubahan sosial dan politik jangka panjang. Ia menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil digital tidak berhenti pada mobilisasi massa, tetapi terus berlanjut dalam bentuk advokasi kebijakan dan wacana publik tentang keadilan sosial di Nigeria pasca-protes #EndSARS.

4. KESIMPULAN

Gerakan sosial #EndSARS mencerminkan kebangkitan masyarakat sipil Nigeria dalam menentang kekerasan negara melalui kekuatan aktivisme digital. Melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, gerakan ini berhasil mengubah ekspresi ketidakpuasan publik menjadi tekanan politik yang nyata hingga mendorong pembubaran *Special Anti-Robbery Squad* (SARS) pada Oktober 2020. Secara konseptual, #EndSARS dapat dipahami sebagai bentuk Gerakan Sosial Baru yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan hak asasi manusia, bukan pada perebutan kekuasaan politik semata. Struktur horizontal dan sifat

partisipatifnya menunjukkan transformasi cara masyarakat berorganisasi di era digital.

Meskipun pembubaran SARS belum sepenuhnya diikuti oleh reformasi kelembagaan yang menyeluruh, gerakan ini telah menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya transparansi dan tanggung jawab institusi keamanan. Tuntutan #5for5 yang muncul dari gerakan ini tetap menjadi agenda moral dan politik jangka panjang bagi reformasi sektor kepolisian Nigeria. Dengan demikian, #EndSARS tidak hanya meninggalkan jejak sebagai protes terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga sebagai simbol perubahan sosial yang memperkuat demokrasi partisipatif dan menegaskan peran teknologi digital sebagai alat perjuangan masyarakat sipil di abad ke-21.

REFERENSI

- Aborisade, R. (2021). EndSARS protests in Nigeria: Repression, resistance, and resurgence of youth movements. *Journal of Contemporary African Studies*, 39(4), 510–528
- Aborisade, R. (2021). Policing and the Challenges of EndSARS Protests in Nigeria. *Journal of African Security Studies*, 14(2), 55–72. <https://doi.org/10.1080/14751798.2021.1892235>
- Adebayo, A. (2013). Youth unemployment and national development in Nigeria: Challenges and prospects. *International Journal of Social Sciences & Humanities Review*, 4(1), 201–215.
- Akinwotu, E. (2020, October 22). End SARS: What you need to know about Nigeria's protests. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-africa-54508781>
- Alemika, E., & Chukwuma, I. (2000). Police Community Violence in Nigeria. Lagos: Centre for Law Enforcement Education. <https://cleen.org/publications>
- Amnesty International. (2016). Nigeria: You Have Signed Your Death Warrant – Torture and Other Ill-treatment in the Special Anti-Robbery Squad (SARS). London: Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/4868/2016/en/>

- BBC. (2020). Nigeria protests: The Feminist Coalition supporting #EndSARS. BBC News Africa. <https://www.bbc.com/news/world-africa-54662986>
- Amnesty International. (2020). Nigeria: Time to End Impunity. London: Amnesty International Report. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/4317/2020/en/>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Cohen, J. L. (1985). Strategy or identity: New theoretical paradigms and contemporary social movements. *Social Research*, 52(4), 663–716.
- Cowell, A. (2020). Nigeria's president announces disbandment of SARS amid protests. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2020/10/21/world/africa/nigeria-sars-protests.html>
- Cowell, A. (2020). Nigeria's #EndSARS Protests and the Challenge of Police Reform. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/21/nigeria-endsars-protests-police-reform>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book235677>
- Ezeibe, C. C., et al. (2023). Digital resistance and civic space in Africa. *African Affairs*, 122(488), 205–227. <https://doi.org/10.1093/afraf/adad005>
- Human Rights Watch. (2005). *Rest in Pieces: Police Torture and Deaths in Custody in Nigeria*. New York: Human Rights Watch Report. <https://www.hrw.org/report/2005/07/27/rest-pieces/police-torture-and-deaths-custody-nigeria>
- Human Rights Watch. (2021). Nigeria: Judicial Panels on SARS Abuses Must Deliver Justice. *Human Rights Watch Annual Brief*.

<https://www.hrw.org/news/2021/02/09/nigeria-judicial-panels-sars-abuses-must-deliver-justice>

Iwilade, A. (2020). The transnational dimensions of #EndSARS: Digital activism and diaspora solidarity. *African Studies Review*, 63(3), 511–518. <https://doi.org/10.1017/asr.2020.125>

Joyce, M. (2010). *Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change*. New York: iDebate Press. https://books.google.com/books/about/Digital_Activism_Decoded.html

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press. <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801484568/activists-beyond-borders/>

Makinde, T. (2020). "Hashtag Activism and the EndSARS Movement in Nigeria." *African Media Review*, 28(3), 112–134. https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/ejc-afmed_v28_n3_a7

Pichardo, N. A. (1997). "New Social Movements: A Critical Review." *Annual Review of Sociology*, 23(1), 411–430. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.411>

Raji, S. (2021). "The Digital Uprising: Understanding the EndSARS Protest in Nigeria." *Journal of Contemporary African Studies*, 39(4), 623–642. <https://doi.org/10.1080/02589001.2021.1932349>

Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3rd ed.). New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973529>

Uwalaka, T., & Nwala, O. (2021). "Youth, Media, and Political Consciousness in the EndSARS Movement." *African Affairs*, 120(481), 207–228. <https://doi.org/10.1093/afraf/adab003>